



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Analisis Kinerja Pemerintah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Agmelia Eka Rahayu Sandra

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Subroto km 7 kebun nenas jake teluk kuantan
Email: agmeliasandra@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah di Kantor Lurah Sungai Jering yang mana pada pemerintahan kelurahan tersebut dirasa kinerjanya masih belum baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja menjadi penilaian awal berhasil tidaknya pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Pemerintah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti menemukan adanya pegawai di Kantor Lurah Sungai Jering tersebut tidak masuk kantor sesuai dengan jadwalnya, kurangnya komputer dan printer di Kantor Lurah tersebut sehingga menyebabkan kinerja yang kurang baik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dan kuantitatif atau campuran yang mana penelitian kualitatif ini tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan informannya yaitu Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi, dan staf, sedangkan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang bersifat angka dengan populasi dan sampelnya yaitu masyarakat kelurahan Sungai Jering. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuisioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Kinerja pegawai kelurahan Sungai Jering yaitu cukup baik.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Kelurahan Sungai Jering.

ABSTRACT

The problem in this research is that in the Sungai Jering Village Head Office, the performance of the village administration is still not good. This study aims to find out how the performance of village government in carrying out their duties. Performance is a preliminary assessment of the success or failure of the village government in carrying out its duties. The formulation of the problem in this study is how the performance of the Sungai Jering Village Government, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. Researchers found that there were employees at the Sungai Jering Village Head Office who did not enter the office according to their schedule, the lack of computers and printers in the Lurah Office, causing poor performance. The type of research used in this research is qualitative and quantitative research or a mixture where this qualitative research is about descriptive research and tends to use analysis with the informants, namely the Village Head, Secretary of the Village Head, Section Head, and staff, while quantitative research is numerical research. with the population and sample, namely the community of Sungai Jering village. Data collection techniques using questionnaires,



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

observations, interviews, and documentation. From the results of the study, it was concluded that the performance of Sungai Jering village employees was quite good.

Keywords: Performance, Village Government Sungai Jering.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*out-come*). Bila diperhatikan lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang mengolah *in-put* menjadi *out-put* (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya, terutama tujuan organisasi.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Kinerja karyawan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kinerja yang lebih tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas, atau kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada seseorang karyawan dalam suatu organisasi.

Pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan kedudukan dan peranannya untuk melanjutkan dan menyelesaikan tugas-tugas pemerintah dan melanjutkan pembangunan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

masyarakat, serta mencapai tujuan nasional. Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan nasional tersebut, maka dibutuhkan pegawai yang disiplin, bersemangat, dan bekerja penuh dengan tanggung jawab serta mengabdikan kepada masyarakat dan negara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam pencapaian tujuan pembangunan, pegawai merupakan unsur penggerak utama yang terlibat dalam mekanisme pembangunan dan sistem pemerintahan. Untuk kepentingan tersebut, sangat dibutuhkan perhatian pemerintah terhadap kinerja pegawai.

Kinerja pegawai adalah sejauh mana pegawai tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam arti kata pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan untuk tercapainya kinerja pegawai dengan baik. Maka pegawai dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintah sesuai dengan tugas yang dibebankan. Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus memiliki keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui pekerjaannya. Dengan kata lain kinerja individu dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri adalah perasaan individu terhadap pekerjaannya.

Manajemen kinerja memberikan manfaat bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga manajer, dan individu. Manfaat manajemen kinerja bagi organisasi antara lain adalah dalam menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, mengusahakan basis perencanaan karier, membantu menahan pekerja terampil untuk tidak pindah, mendukung inisiatif kualitas total dan pelayan pelanggan, dan mendukung perubahan budaya.

Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan kualitas kerja, pembinaan selanjutnya, tindakan perbaikan atas pekerjaan yang kurang sesuai deskripsi pekerjaan, serta untuk keperluan yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan lainnya.

Unsur penilaian terhadap Kinerja Pegawai, pertama yaitu penggunaan tenaga kerja yang efektif dan terarah merupakan kunci dari peningkatan kinerja pegawai, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan perusahaan melalui penerapan struktur organisasi yang baik didalam menggerakkan tenaga kerja tersebut agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kedua yaitu prestasi kerja, hasil prestasi kerja pegawai, baik kualitas maupun kuantitas menjadi tolak ukur kinerja. Dimana Kualitas merupakan sikap



yang ditunjukkan oleh karyawan berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian dan keterkaitan hasil tidak mengabaikan volume pekerjaan didalam mengerjakan pekerjaan. Sedangkan Kuantitas merupakan volume kerja yang dihasilkan dalam kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang didapat atau dialami pekerja selama bekerja. Ketiga yaitu kerja sama, diukur dari kesediaan pegawai/karyawan dalam berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan lain secara vertikal dan horizontal sehingga hasil pekerjaannya akan semakin baik. Kelima yaitu tanggung jawab, kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakan, serta perilaku kerjanya.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat. Lurah diangkat oleh Bupati atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Kedudukan dan Tugas Pokok Kelurahan :

1. Ketentuan umum
 - 1) Lurah adalah Kepala Kelurahan.
 - 2) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - 3) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.
 - 4) Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisien dan peningkatan akuntabilitas.
 - 5) Pelimpahan urusan pemerintahan disertai dengan sarana dan prasarana, pembiayaan dan personil.
 - 6) Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Menteri.
2. Tugas Pokok
 1. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan.
 - 1) Melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian aparat pemerintah kelurahan.
 - 2) menyelenggarakan pendaftaran atau pencacatan penduduk termasuk orang asing
 - 3) Melaksanakan himbauan atau pemberitahuan tentang konflik yang terjadi kepada masyarakat
 2. Pemberdayaan masyarakat.
 - 1) Penyediaan pelayanan pengurusan surat izin usaha.
 - 2) Penampungan aspirasi ekonomi di masyarakat kelurahan dengan melakukan musyawarah.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

- 3) membina perekonomian masyarakat. pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi unit desa, perkreditan dan lembaga-lembaga arisan.
 3. Pelayanan masyarakat.
Tugas masing-masing Kepala Seksi dibidang pelayanan yaitu :
 - 1) Kepala Seksi Pemerintahan
Jenis Pelayanannya : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Pengantar Keterangan Pindah, Surat Tanah, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Berdomisili, Pengantar Keterangan Kelahiran, Legalisir Surat Pengantar Ahli Waris, Surat Keterangan tidak Mampu.
 - 2) Kepala Seksi Pembangunan
Jenis Pelayanannya : Surat Keterangan belum Memiliki Rumah, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Penghasilan
 - 3) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Jenis Pelayanannya : Surat Pengantar Pendetang Baru, SKCK.
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - 1) Mengadakan siskamling atau sistem keamanan lingkungan
 - 2) Pembinaan lingkungan RT/RW
 - 3) Mediasi kepada masyarakat kelurahan apabila ada konflik
 4. Pemeliharaan prasarana dan sarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - 1) pemeliharaan prasarana dan sarana dikantor contohnya pemeliharaan komputer, pemeliharaan kantor kelurahan, pemeliharaan teknologi-teknologi kantor, pemeliharaan meja dan kursi, dan pemeliharaan aset-aset milik daerah di kelurahan
 5. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
 - 1) Terlibat aktif dalam organisasi kepemudaan, memfasilitasi kegiatan kepemudaan, kegiatan wirid dan organisasi kemasyarakatan lainnya
 - 2) Melakukan kegiatan penyuluhan, kursus, pelatihan dan pendidikan, contohnya penyuluhan dari kegiatan posyandu, dan pelatihan untuk kegiatan kelompok tani dalam bidang kelapa sawit dan getah karet.
- Pembentukan Kelurahan yaitu :
- 1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.
 - 2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.
 - 3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud diatas harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana pemerintahan.
 - 4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas dapat dihapuskan atau digabung.
 - 5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan pemerintah kelurahan.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 2016, kewenangan kelurahan yaitu :

1. Kepala Kelurahan

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 2016, Kepala Kelurahan mempunyai tugas :

- 1) Membantu camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan.
- 3) Pemberdayaan masyarakat.
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- 6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi antara lain yaitu :

1. Pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan.
2. Pembinaan lingkungan RT dan RW.
3. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
4. Pelaksaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban Kelurahan.
5. Menyusun program pembinaan Administrasi Ketatausahaan dan rumah tangga lainnya.

2. Sekretaris Kelurahan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan dan memberikan pelayanan staf kepada kepala kelurahan. Uraian tugasnya yaitu :

1. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan.
2. Merumuskan dan melaksanakan pemberian pelayanan staf kepada kepala Kelurahan.
3. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan.
4. Merumuskan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepala kelurahan apabila Kepala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan melaksanakan tugas.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

3. Kepala Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kelurahan dibidang pemerintahan. Uraian tugasnya yaitu :

1. Merumuskan dan melaksanakan serta mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian aparat pemerintah kelurahan.



2. Merumuskan dan melaksanakan serta menyelenggarakan pendaftaran atau pencacatan penduduk termasuk orang asing.
3. Merumuskan dan melaksana serta mengumpulkan data pengembangan dan kegiatan kelurahan.
4. Merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan kerjasama antar kelurahan
5. Merumuskan dan melaksanakan serta mengumpulkan data dan mempersiapkan laporan tentang kegiatan dan pelaksanaan pemilihan umum.

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kelurahan di bidang pembangunan. Uraian tugasnya yaitu :

1. Merumuskan dan melaksanakan serta membina, mendorong dan mengembangkan perekonomian masyarakat, pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi unit desa, perkreditan dan lembaga-lembaga arisan.
2. Merumuskan dan melaksanakan serta mendorong peningkatan hasil perekonomian dan kegiatan industri rumah tangga (*home industri*).
3. Merumuskan laporan usaha perekonomian, pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi unit desa dan lembaga-lembaga arisan.
4. Merumuskan dan melaksanakan serta mengumpulkan, memelihara dan mengolah data pembangunan kelurahan.
5. Merumuskan dan melaksanakan serta mengadakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan kelurahan yang dibiayai dengan bantuan pemerintah, swadaya masyarakat dan usaha-usaha lainnya.
6. Merumuskan dan melaksanakan serta menyiapkan perumusan naskah evaluasi dan penyusunan laporan perkembangan perekonomian kelurahan dan pelaksanaan pembangunan kelurahan.

5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian Kepala Kelurahan dibidang ketentraman dan ketertiban. Uraian tugasnya yaitu :

1. Merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Merumuskan dan melaksanakan, mengikuti, mengumpulkan dan mempersiapkan laporan tentang peristiwa-peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum.
3. Merumuskan dan melaksanakan serta mengumpulkan dan mempersiapkan data dalam rangka pembinaan pertahanan sipil.
4. Merumuskan dan melaksanakan, mengikuti, mengumpulkan data dan menyusun laporan tentang pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa faktor yang menghambat kurang maksimalnya kinerja di Kantor Lurah Sungai Jering :

- 1) Belum memadainya sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan, seperti kurangnya komputer yang membuat kerja para pegawai tidak efektif dan efisien.
- 2) Masih banyaknya keluhan masyarakat karena dalam melaksanakan kegiatan kurangnya disiplin para pegawai, contohnya pegawai di Kantor Lurah Sungai Jering tersebut tidak masuk kantor sesuai dengan jadwalnya, yang mana



kantor buka atau melayani masyarakat ketika pukul 10.00 WIB, seharusnya kantor sudah dibuka pada pukul 08.00 WIB. Selanjutnya permasalahan kinerjanya yaitu :

1. Pencatatan kependudukan termasuk orang asing belum adanya data yang terbaru
2. Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan Sungai Jering belum terlaksana, contohnya tidak berjalannya sistem keamanan lingkungan atau siskamling
3. Pemeliharaan fasilitas pelayanan contohnya komputer dan printer yang rusak

Dari berbagai permasalahan yang disebutkan diatas, sehingga yang mana pada permasalahan ini bisa diambil untuk judul penelitian yaitu **“Analisis Kinerja Pemerintah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Kinerja Pemerintah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pemerintah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk penelitian Ilmu Administrasi Negara, khususnya dibidang kinerja yang berhubungan dengan Kinerja Pemerintah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

1.4.2 Aspek Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam bentuk bacaan untuk memperkaya wawasan setiap individu yang membaca hasil penelitian ini, dan menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Pengertian Administrasi Negara secara umum adalah suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah/aparatur negara agar tujuan Negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Istilah Administrasi Negara dapat dibagi kedalam dua bentuk yakni Administrasi dan Negara. Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *Administrare* yang berarti melayani, membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah *Administration* yang berarti melayani. Sedangkan Negara secara etimologis berasal dari dari bahasa Inggris yaitu *state* yang artinya dalam bahasa Latin yaitu keadaan yang



tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap atau yang sering disebut station yang berarti kedudukan.

2.1.3 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah proses pendayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Proses dimaksud melibatkan organisasi, arahan, koordinasi, dan evaluasi orang-orang guna mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut (Sinamora, 2001). Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Manajemen Sumber Daya Manusia juga menyangkut desain pekerjaan, perencanaan pegawai, seleksi dan penempatan, pengembangan pegawai, pengelolaan karier, kompensasi, evaluasi kinerja pengembangan tim kerja, sampai dengan masa pensiun.

2.1.4 Teori/Konsep Kinerja

Secara Etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lebih lanjut Mangkunegara (2007) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Menurut Nawawi (2004) menyatakan bahwa, “kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/material maupun non fisik/non material.

2.1.5 Teori/Konsep Pemerintah Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat. Lurah diangkat oleh Bupati atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa.

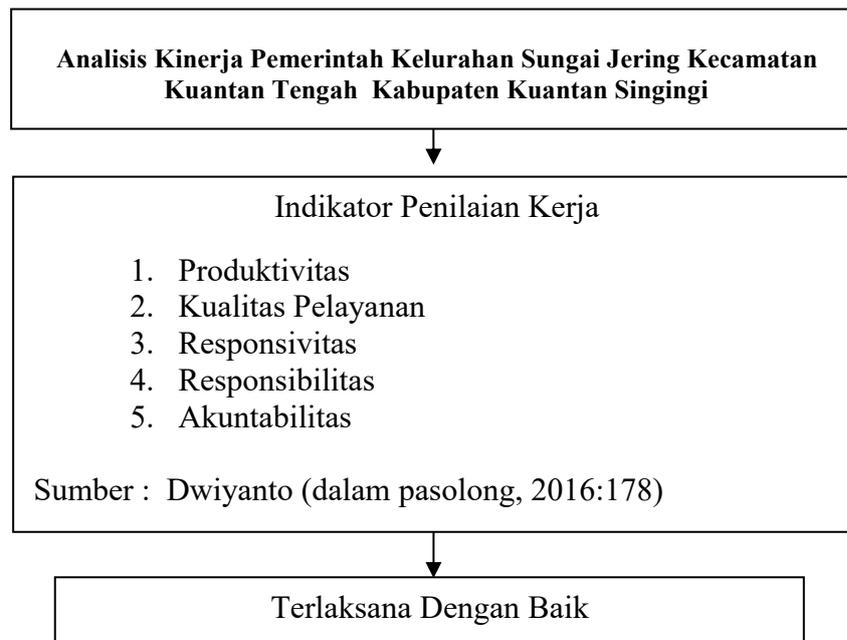
2.1.6 Teori/Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari kata organ (sebuah kata dalam bahasa Yunani) yang berarti alat. Oleh karena itu dapat didefinisikan organisasi sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak dan tak terkecuali kepuasan bagi pemilikinya. Stephen P. Robbins mendefinisikan organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.



2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran tentang Kinerja Pemerintah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi Penelitian pada 2022

2.4 Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini di jelaskan konsep yang di gunakan sebagai acuan penelitian ini :

1. Produktivitas

Produktivitas yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipakai sebagai ratio antara input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas.

3. Responsivitas

Responsivitas ialah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-



program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.

4. Responsibilitas

Responsibilitas ialah menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh karena itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik.

2.5 Operasional Variabel

Tabel I.1 Operasional Variabel tentang Analisis Kinerja Pemerintah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Analisis	Kinerja	1. Produktivitas	a) Efisiensi Pelayanan b) Efektifitas Pelayanan	Ordinal
		2. Kualitas Layanan	a) Kecepatan waktu pelayanan b) Akurasi Pelayanan	
		3. Responsivitas	a) Kebutuhan Masyarakat b) Prioritas Pelayanan	Ordinal
		4.Responsibilitas	a) Pelaksanaan Kegiatan b) Kewajiban Menyelesaikan Tugas	Ordinal
		5.Akuntabilitas	a) Ketepatan Waktu Bekerja b) Tanggung Jawab Terhadap Pekerjaan	Ordinal



Sumber : Modifikasi Penelitian pada 2022

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kualitatif dan kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono 2017:7). Untuk mempermudah dalam memperoleh persentase jawaban tersebut maka penulis menentukan sampel dengan menggunakan rumus slovin berikut ini :
Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

N = Populasi

E = Persepsi akibat pengambilan sampel yang dapat ditolerir (15% = 0,15)

Dari rumus slovin diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{4965}{1 + 4965 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{4965}{1 + 111,7}$$

$$n = \frac{4965}{112,7}$$

$$n = 44,0 = 44 \text{ responden}$$

Untuk lebih jelasnya yang menjadi populasi dan sampel penelitian ini adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.2 Informan tentang Analisis Kinerja Pemerintah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Informan	Jumlah		Presentase
		Populasi	Sampel	



1.	Lurah Sungai Jering	1	1	100%
2.	Sekretaris Lurah Sungai Jering	1	1	100%
3.	Kepala Seksi Kelurahan Sungai Jering	3	3	100%
4.	Staf Kelurahan Sungai Jering	3	3	100%
5.	Masyarakat Sungai Jering	4965	44	2,27%
Jumlah		4973	52	

Sumber : Modifikasi Penelitian pada 2022

Jadi, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 44 orang. Untuk perangkat kelurahan digunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang mana jumlah sampel untuk perangkat kelurahan berjumlah 8 orang, dan untuk unsur masyarakat digunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 44 orang.

Hasil Penelitian dan pembahasan Penelitian Tentang Analisis Kinerja Pemerintah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Produktivitas

Tanggapan responden terhadap indikator produktivitas yang memilih Baik 5 orang dengan persentase (11%), pada kategori cukup baik berjumlah 14 orang dengan persentase (32%), kategori kurang baik berjumlah 20 orang dengan persentase (46%), kategori tidak baik 5 orang dengan persentase (11%) dan menjawab sangat tidak baik berjumlah 0 orang dengan persentase (0%). Adapun Rata-rata dari tanggapan Responden adalah yang berada pada skala interval 3,40-4,19, dapat disimpulkan indikator Produktivitas memiliki pengukuran Cukup Baik.

Kualitas Pelayanan

Diketahui tanggapan Responden terhadap indikator kualitas pelayanan yang memilih Baik 3 orang dengan persentase (9%), pada kategori cukup baik berjumlah 18 orang dengan persentase (40%), kategori kurang baik berjumlah 19 orang dengan persentase (42%), kategori tidak baik 4 orang dengan persentase (9%) dan menjawab sangat tidak baik berjumlah 0 orang dengan persentase (0%). Adapun Rata-rata dari tanggapan Responden adalah yang berada pada skala interval 3,20-4,19, dapat disimpulkan indikator Kualitas Pelayanan memiliki pengukuran Cukup Baik.

Responsivitas

Tanggapan Responden terhadap indikator responsivitas yang memilih Baik 3 orang dengan persentase (7%), pada kategori cukup baik berjumlah 7 orang dengan persentase (16%), kategori kurang baik berjumlah 26 orang dengan persentase (58%), kategori tidak baik 8 orang dengan persentase (19%) dan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

menjawab sangat tidak baik berjumlah orang 0 dengan persentase (0%). Adapun Rata-rata dari tanggapan Responden adalah yang berada pada skala interval 2,60-3,39, dapat disimpulkan indikator Responsivitas memiliki pengukuran Kurang Baik.

Responsibilitas

Tanggapan Responden terhadap indikator responsibilitas yang memilih Baik 5 orang dengan persentase (11%), pada kategori cukup baik berjumlah 21 orang dengan persentase (48%), kategori kurang baik berjumlah 16 orang dengan persentase (36%), kategori tidak baik 2 orang dengan persentase (5%) dan menjawab sangat tidak baik berjumlah orang 0 dengan persentase (0%). Adapun Rata-rata dari tanggapan Responden adalah yang berada pada skala interval 3,40-4,19, dapat disimpulkan indikator Responsibilitas memiliki pengukuran Cukup Baik.

Akuntabilitas

Tanggapan Responden terhadap indikator akuntabilitas yang memilih Baik 3 orang dengan persentase (7%), pada kategori cukup baik berjumlah 17 orang dengan persentase (38%), kategori kurang baik berjumlah 21 orang dengan persentase (48%), kategori tidak baik 3 orang dengan persentase (7%) dan menjawab sangat tidak baik berjumlah 0 orang dengan persentase (0%). Adapun Rata-rata dari tanggapan Responden adalah yang berada pada skala interval 3,20-4,19, dapat disimpulkan indikator Akuntabilitas memiliki pengukuran Cukup Baik.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah peneliti lakukan mengenai Analisis Kinerja Pemerintah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pemerintah Kelurahan Sungai Jering yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang dengan persentase (9%) yang mengatakan Cukup Baik 15 orang dengan persentase (34%) yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 21 orang dengan persentase (48%) dan yang mengatakan Tidak Baik 4 orang dengan persentase (9%), dan yang mengatakan Sangat Tidak Baik 0 orang dengan persentase (0%). Adapun rata-rata tanggapan responden adalah yang berada pada skala interval 3,20-4,19 jadi dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pemerintah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Cukup Baik.

Dari hasil penelitian ini, sebenarnya pihak pegawai kelurahan Sungai Jering sudah dan telah melaksanakan kinerjanya dengan sebaik-sebaiknya, namun dalam hal itu terdapat beberapa faktor penunjang seperti prasarana yang kurang baik yang membuat kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dirasa masih kurang, para masyarakat kelurahan Sungai Jering juga hanya menilai dari apa yang dirasakan dan dilihat tanpa mengetahui keadaan dari kantor kelurahan tersebut, dan juga kurangnya disiplin pegawai yang menyebabkan kinerja dirasa cukup.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Saran

1. Diharapkan kepada seluruh pegawai Kelurahan Sungai Jering dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan sebaik-baiknya.
2. Perlunya diberikan sanksi kepada para pegawai Kelurahan Sungai Jering ketika ada pegawai yang kurang disiplin saat melaksanakan tugasnya.
3. Pegawai memberikan sikap yang ramah terhadap masyarakat yang ingin melakukan pengurusan di kantor lurah tersebut.
4. Meningkatkan kepekaan atas kebutuhan masyarakat, agar masyarakat merasa puas dan senang.
5. Memelihara fasilitas yang sudah tersedia, seperti printer yang rusak, agar segera diperbaiki, untuk memudahkan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Dessler, Gray. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Selemba Empat
- Fahmi Irham S.E., M.Si. 2016. *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus*. Bandung: Alfabeta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Cet III*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Manulang. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mangkunegara, A.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada
- Pedoman *Penyusunan Tugas Akhir Program Studi Administrasi Negara* Fakultas ilmu sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
- Prawirosentono, Suryadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Robbins, Stepens P.. 2006. *Perilaku Organisasi*. PT Indeks, Jakarta: Kelompok Gramedia

Sinambela Poltak Lijan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara

Sutarto. 1998. *Dasar-dasar Organisasi*. Gadjah Mada University Press

Siagian P. Sondang, M.P.A. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Aksara. Bandung

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta

Sondang P. Siagian, M.P.A. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Sukarna, 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju

Y.W Sunindhia, S.H, Dra. Ninik Widiyanti. 1992. *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Zeithaml. 1990 dalam Hardyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gava Media

B. Undang-Undang

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 yang mengatur tentang kelurahan.